



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**  
**NOMOR : W13.U5/ 27 /SK.KPN/OT.00/II/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

- Menimbang** :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
  - c. Bahwa personil dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Nomor W13.U5/ 18 /SK.KPN/OT.00/II/2023 Tanggal 18 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sudah mengalami mutasi dan promosi di tempat lain, sehingga susunannya perlu diperbarui;
  - d. Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana berdasarkan pada kompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan;
  - e. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - 7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
  - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
  - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KETIGA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/ 18 /SK.KPN/OT.00/I/2023 Tanggal 18 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 7 Februari 2023

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**  
**KETUA,**



**SUNOTO, S.H.M.H**  
**NIP.197206061995031002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Masing-masing yang bersangkutan.
2. Desk ZI dan APM
3. Arsip.



Lampiran  
 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB  
 Nomor : W13.U5/29 /SK.KPN/OT.00/II/2023  
 Tanggal : 7 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
 PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

Pembina	KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL SUNOTO, S.H.,M.H
Ketua	WAKIL KETUA KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum
Koordinator Teknikal	PLT.PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTUL ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H
Koordinator Operasional	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak

<b>AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS PIDANA DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.,M.Hum
Sekretraris	BASKARA NABLA PUTRA, S.H HENDRI WIJAYA, S.H
Anggota	PANITERA MUDA PIDANA : DARU BUANA SEJATI, S.H
	AANG PRABOWO, S.H RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H RIMBANG KRISDIANTO, S.H CAHYA MULYANTO, S.H SUYATINI ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B WAWAN ARI PRABOWO

<b>AREA II PENATAAN TATA LAKSANA</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATA KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.
Sekretaris	ZHRATUSHALIAH, A.Md.M ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H
Anggota	PANITERA MUDA PERDATA : ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H
	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. SUDILAH, S.H. NURUSSOBAN, S.H.,M.H SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H IKA HEPYAWATI, SE SURADAL SATRIA PINANDITA, S.E SAPTA WIDADA NANANG NUGROHO

<b>AREA III PENATAAN SDM APARATUR</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H
Sekretaris	ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA ARIEF NOOR RAHMAN
	ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H. AGUS NUR ISRIYADI, S.H. ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd MEY LINA SELISTIAWATI, S.E

<b>AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.M.Hum
Sekretaris	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN: PRASETYO, S.T. YOHANES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md
	SITI SOLIKHAH, S.H ANA RATNAWATI MOHAMMAD JAZURI DWI ANGGORO

<b>AREA V PENGUATAN PENGAWASAN</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM: GATOT RAHARJO, S.H.M.H
Sekretaris	DIAH PRAVITASIWI, S.H PRASETYA SUJADI, S.H
Anggota	PANITERA MUDA HUKUM : RETNO PRABANDARI, S.H.M.Kn RENY WIJAYANTI, S.H MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. ANJAR DWIYANTO, S.H SUPRIYADI DIYAN RAHMAWATI

<b>AREA VI</b> <b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS PERENCANAAN , TI DAN PELAPORAN GATOT RAHARJO, S.H.M.H
Sekretaris	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P FADHILA FATHUL JANNAH, S.E.I
Anggota	AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H ENY KISDARYANTI, S.E., S.H. SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H. HENDRA ANDREA, A.Md SUMARDIYONO MUHAMAD HARIYADI

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**  
**KETUA,**



**SUNOTO, S.H.M.H**  
**NIP.197206061995031002**